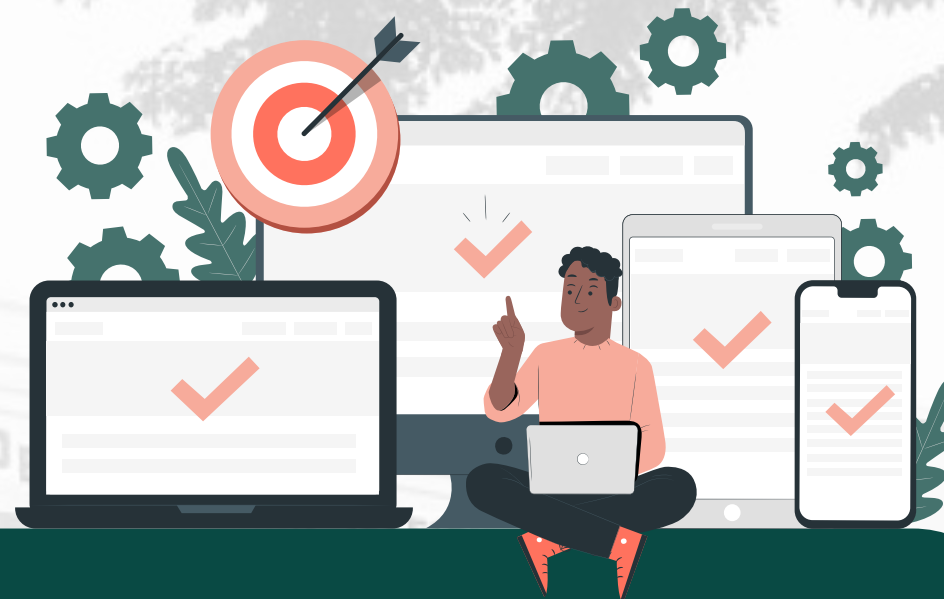




Webinar Seri IV Sanitation and Water for All (SWA) dan Mutual Accountability Mechanism (MAM)



Investasi Bisnis dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Tri Dewi Virgiyanti

DIREKTORAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SANITATION AND WATER FOR ALL (SWA) dan MEKANISME AKUNTABILITAS MUTUAL (MAM)



PERTEMUAN TINGKAT TINGGI SANITATION WATER FOR ALL (SWA): FMM & SMM



SWA telah menginisiasi penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi sejak tahun 2010 yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di berbagai negara anggota. Saat ini telah ada **95 negara yang bergabung menjadi anggota SWA.**



Pertemuan rutin ditujukan untuk memberikan advokasi kepada para stakeholder setingkat Menteri melalui dialog antar negara yaitu **Sector Ministers' Meeting (SMM) dan Finance Ministers' Meeting (FMM).**



Indonesia pertama kali diundang dalam SMM dan FMM tahun 2017 dan turut berperan aktif dalam setiap sesi yang diwakilkan oleh Menteri PPN 2016-2019. **Indonesia berpartisipasi pada SMM 2019 dan FMM 2020.**



Tujuan dari keikutsertaan Indonesia dalam SWA adalah untuk saling bertukar pembelajaran dengan negara lain dalam mempercepat pencapaian SDGs Goal 6, serta meningkatkan kepemimpinan politik dalam pembangunan WASH



Tahun 2022 SMM akan dilaksanakan di Indonesia pada 18-19 Mei 2022 di DKI Jakarta yang mengangkat tema **"Building Forward Better for Recovery and Resilience"** selaras dengan tema G20 **"Recover Together, Recover Stronger"**.

Sector Ministers' Meeting (SMM)-Sanitation and Water for All dan KSAN 2022

Sector Minister Meeting (SMM)

SMM adalah forum pertemuan high-level tingkat dunia di sektor air minum, sanitasi, dan higienitas yang dibentuk oleh organisasi SWA (*Sanitation Water for All*) dan diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali

Output: Terbentuknya komitmen antar negara dalam sektor air minum, sanitasi, dan higienitas untuk mendukung SDGs



Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN)

KSAN merupakan ajang komunikasi dan advokasi terbesar tingkat nasional di sektor sanitasi dan air minum. KSAN diselenggarakan dua tahun sekali dan telah dilaksanakan 6 (enam) kali sejak tahun 2007

Output: Komitmen tingkat nasional antar pemangku kepentingan dalam mendukung target RPJMN & SDGs

Apa itu Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM)?



1

Proses dimana pemangku kepentingan dapat **dimintai pertanggungjawaban** oleh satu sama lain **atas komitmen yang dibuat**.

2

Bertujuan untuk **mencapai tujuan bersama** dan dilakukan dengan **membangun kepercayaan, kesepahaman, serta kolaborasi** antara para pemangku kepentingan.

3

Dalam **konteks SWA**, akuntabilitas mutual merupakan proses dimana para mitra secara bersama **membangun sistem akuntabilitas yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terdapat timeline yang jelas (time-bound actions)**.

4

Mekanisme bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama **membuat komitmen dalam mencapai target SDG 6**.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan **berkolaborasi dalam menentukan komitmen MAM nasional**.

LANGKAH PENERAPAN MAM DI INDONESIA

Komitmen milik bersama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terdapat timeline yang jelas (*time-bound actions*)-SMART.

Perkembangan atas komitmen akan **dinilai dan didiskusikan secara berkala melalui proses *multi-stakeholder*** yang dipimpin oleh pemerintah atau pihak lain.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan **berkolaborasi dalam menentukan komitmen MAM nasional.**



Selain itu, ketika komitmen tidak terpenuhi, **harus ada ruang untuk dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan** dan penyesuaian yang diperlukan.

Proses **perencanaan dan review harus didokumentasikan** secara jelas dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sektor.

Peran Bisnis dalam MAM



- Mendukung pencapaian komitmen MAM, khususnya:
- Pengembangan investasi dan infrastruktur
 - Pengembangan kemitraan dan mobilisasi pembiayaan



Mendorong percepatan pengembangan inovasi teknologi dan perilaku pemanfaatan air yang ramah lingkungan



Menumbuhkan kemitraan dan komitmen bersama yang lebih kuat antara Filantropi, CSO, akademisi, mitra pembangunan dan/atau media dan bertemu secara rutin



Ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan WASH utamanya untuk mendukung pemanfaatan pembiayaan alternatif di sector air minum dan sanitasi



PENDANAAN ALTERNATIF AIR MINUM DAN SANITASI

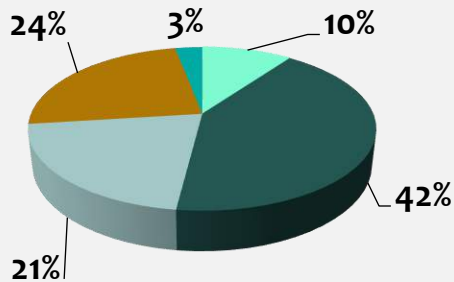
Direktorat Perumahan dan Permukiman



Kebutuhan Pendanaan Air Minum dan Sanitasi (RPJMN 2020-2024)

Air Minum (Rp 123,4 T)

APBD
APBN
DAK
KPBU dan B to B
CSR



Pemanfaatan APBN dan DAK Periode 2020-2024

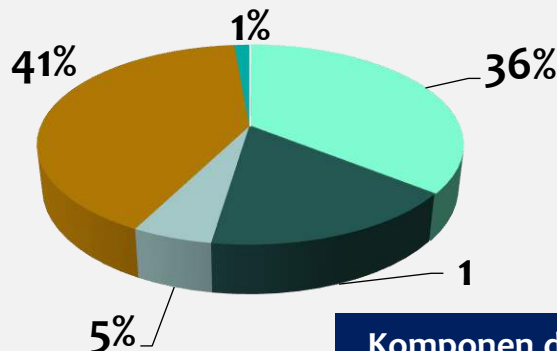
- Fisik:** Pembangunan SPAM (SPAM Regional, SPAM Perkotaan, SPAM Berbasis Masyarakat (Perdesaan)), Peningkatan SPAM, Perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity*
- Non Fisik:** Pendampingan pemda untuk peningkatan kapasitas di bidang teknis, regulasi, layanan, pemberdayaan masyarakat (Kementerian PUPR, Dagri, Kesehatan)

Komponen di luar pendanaan pemerintah (APBN/APBD/DAK), berpotensi melalui alternatif pendanaan lainnya

Air Limbah Domestik (Rp 140,43 T)

99,4% Aspek Fisik termasuk supervisi pemda
0,6% Aspek Non Fisik (Perencanaan, Regulasi, Pengawasan)

K/L
DAK
APBD
Masyarakat
CSR



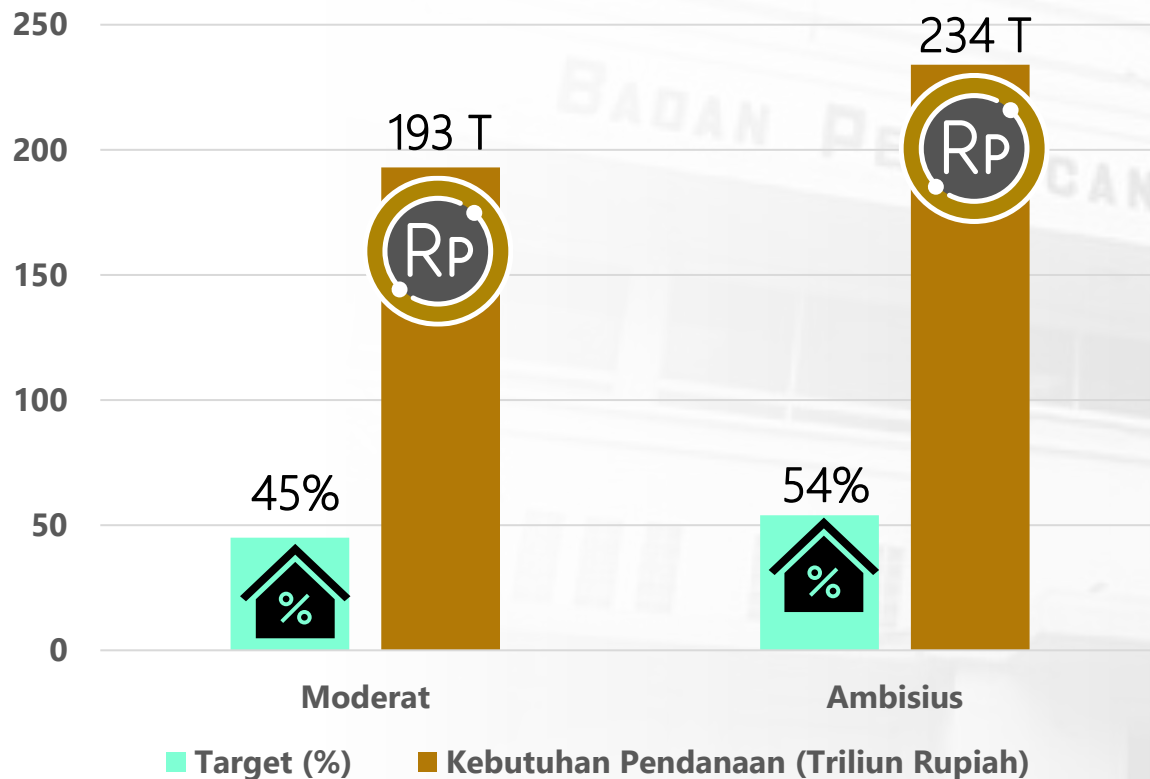
Pemanfaatan Alokasi Belanja K/L dan DAK Periode 2020-2024

- Fisik:**
 - Pembangunan SPALD-T skala regional/kota/permukiman (Belanja K/L dan DAK);
 - Pembangunan IPLT (Belanja K/L);
 - Pembangunan tangki septik skala individu maupun komunal di perkotaan dan perdesaan (Belanja K/L untuk mendukung stunting, DAK, Hibah Air Limbah Setempat)
- Non Fisik:** Pendampingan pemda untuk peningkatan kapasitas di bidang teknis, regulasi, layanan, pemberdayaan masyarakat (Kementerian PUPR, Dagri, Kesehatan)

Komponen di luar pendanaan pemerintah (APBN/APBD/DAK), berpotensi melalui alternatif pendanaan lainnya

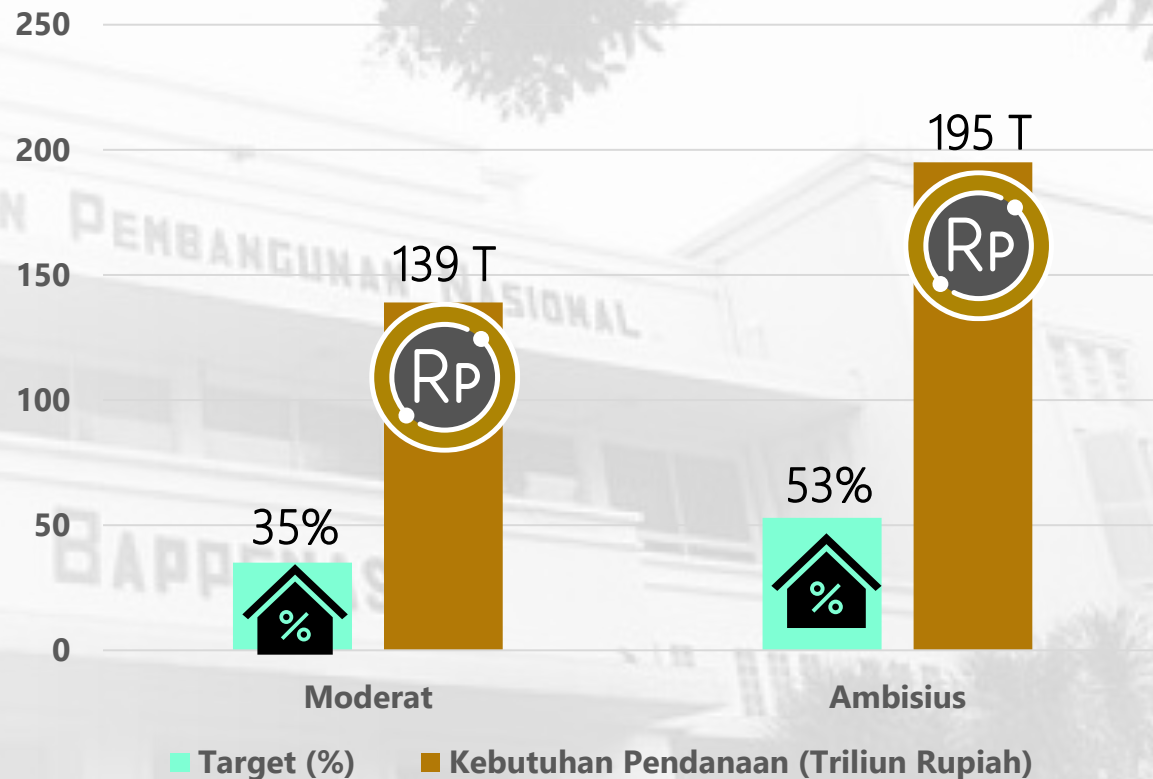
Target SDGs 2030 Indonesia untuk Air Minum & Sanitasi Aman

Air Minum Aman



Target SDGs Indonesia untuk air minum aman memiliki 2 model, yaitu 45% dengan kebutuhan dana sekitar Rp 193 T dan 54% dengan kebutuhan sekitar Rp 234 T

Sanitasi Aman



Target SDGs Indonesia untuk sanitasi aman memiliki 2 model, yaitu 35% dengan kebutuhan dana sekitar Rp 139 T dan 53% dengan kebutuhan sekitar Rp 195 T

Potensi Alternatif Pendanaan Lainnya

Selain dari anggaran Pemerintah (APBN/APBD/DAK), Pemerintah terus menggali potensi alternatif pendanaan lainnya seperti CSR, ZISWAF, Mikro Kredit dan KPBU. Alternatif pendanaan ini diperlukan baik untuk sektor air minum maupun sektor sanitasi.

CSR dan filantropi

- Perlu kebijakan khusus untuk mengoptimalkan CSR dan filantropi

ZISWAF

- Potensi ZISWAF untuk air minum dan sanitasi sudah lebih dari Rp 14 M dan terus meningkat
- Perlu ada sistem yang lebih mantap untuk pemanfaatan dana ZIS untuk WASH

MIKRO KREDIT

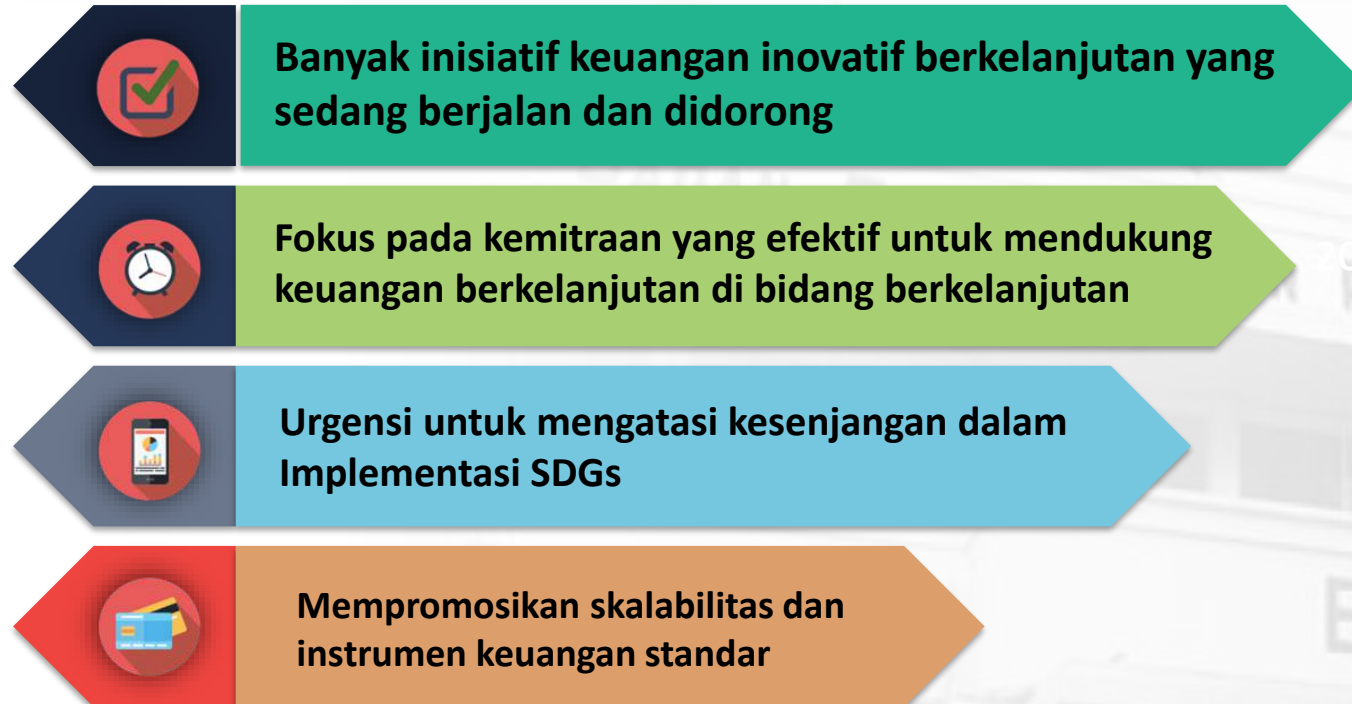
- Praktik kredit mikro air minum dan sanitasi sudah banyak dilakukan oleh LKM. Saat ini sedang digagas berbagai kebijakan pendanaan, oembiayaan dan pendukung untuk perluasan mikro kredit

KPBU

- KPBU berpotensi mendukung pembangunan SPAM, IPLT dan IPALD skala kota dan regional, serta SPAM skala kota dan regional

Banyak mekanisme pembiayaan saat ini, namun belum bisa dikembangkan untuk sektor WASH

Peluang Investasi/Pendanaan dalam SDGs



Upaya Meneruskan Lokalisasi SDGs dari Sisi Filantropi dan Pemerintah

Mendorong yayasan, perwalian, individu, dan perusahaan, melalui anggaran tanggung jawab sosial mereka, untuk berinvestasi dalam proyek modal ventura sosial/filantropi ventura, atau mekanisme lain, daripada sekedar memberikan sumbangan amal.



Mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan insentif berupa pajak atau non-pajak yang dapat mendorong investasi social enterprise.



Mengurangi hambatan kelembagaan dan infrastruktur-ekosistem investasi dampak sosial

Banyak mekanisme pembiayaan saat ini, namun belum bisa dikembangkan untuk sektor WASH

Sumber Pendanaan Inovatif

Potensi Pembiayaan untuk SDGs

Potensi Pembiayaan Global
(Aset keuangan Total): USD 379 Trillion
(OECD, 2021)

Potensi filantropi:

- Dana Zakat: **Rp 327 T/Tahun;**
- Dana sosial Kristiani: **Rp 61 T/Tahun**
- Hindu, Budha dan Kong Hu Cu: **1,5T/Tahun;**
- Perusahaan: **Rp 8,6 T/Tahun ***

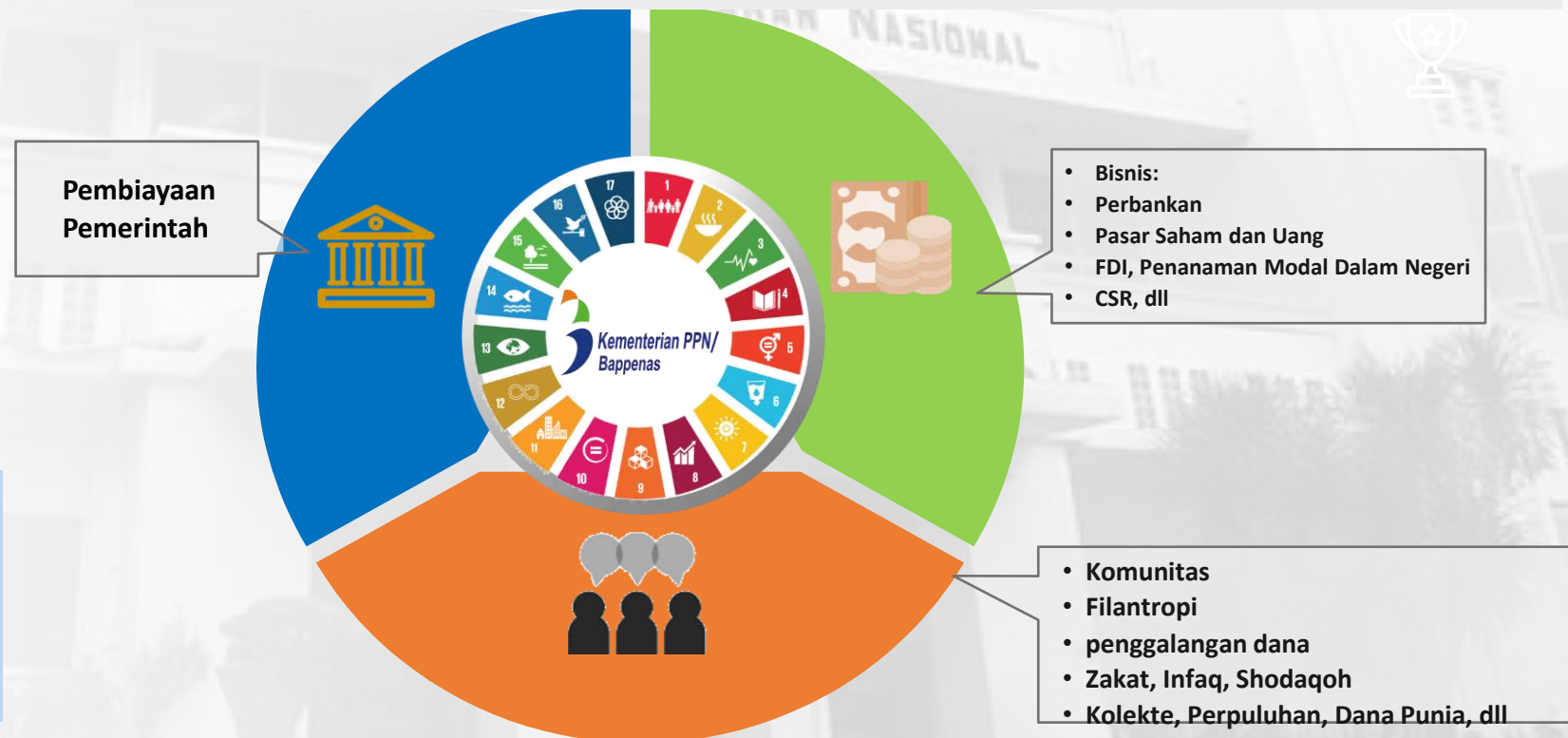
Potensi Dampak Investasi 2019-2024: USD 22,91 miliar

24,6% dari 66 investor berdampak, dan 16,8% investor utama dari 107 investor yang mencari peluang di Indonesia

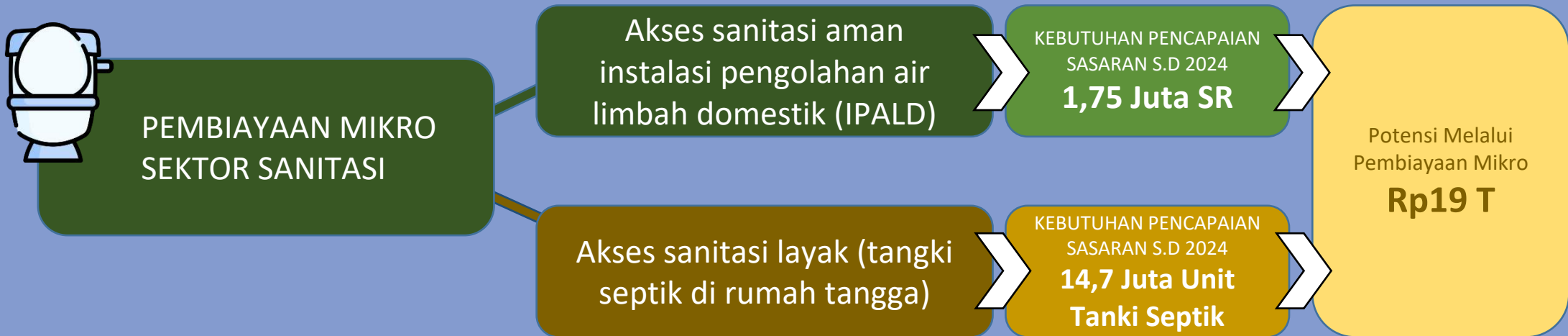
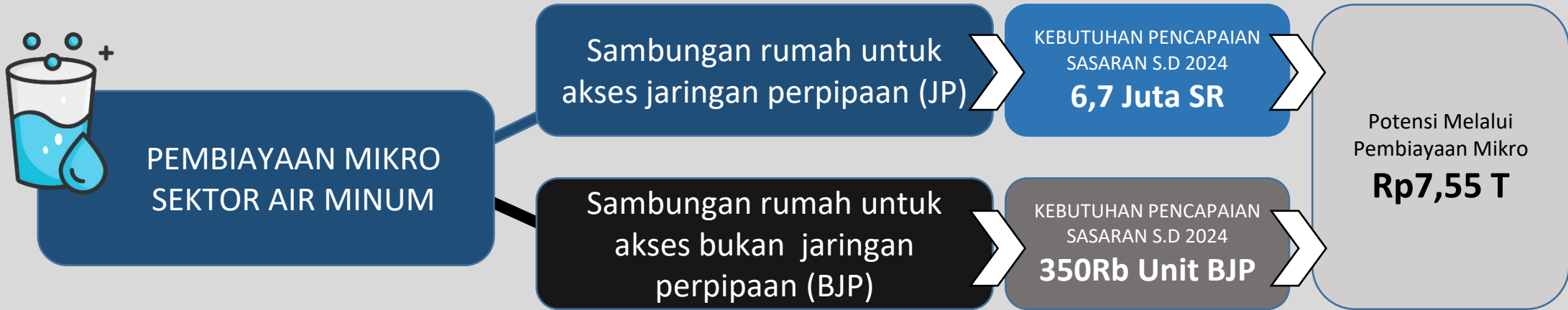
PUSAT PEMBIAYAAN SDGs (Dikordinasikan oleh Bappenas)

Mengintegrasikan, memfasilitasi & mensinergikan semua potensi pembiayaan inovatif untuk mempercepat pencapaian target SDGs

1. Bangun strategi jaringan dan perijodohan yang strategis
2. Ciptakan lingkungan yang mendukung untuk pembiayaan inovatif
3. Mengembangkan model, instrumen, dan teknologi (untuk dipamerkan)
4. Peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan



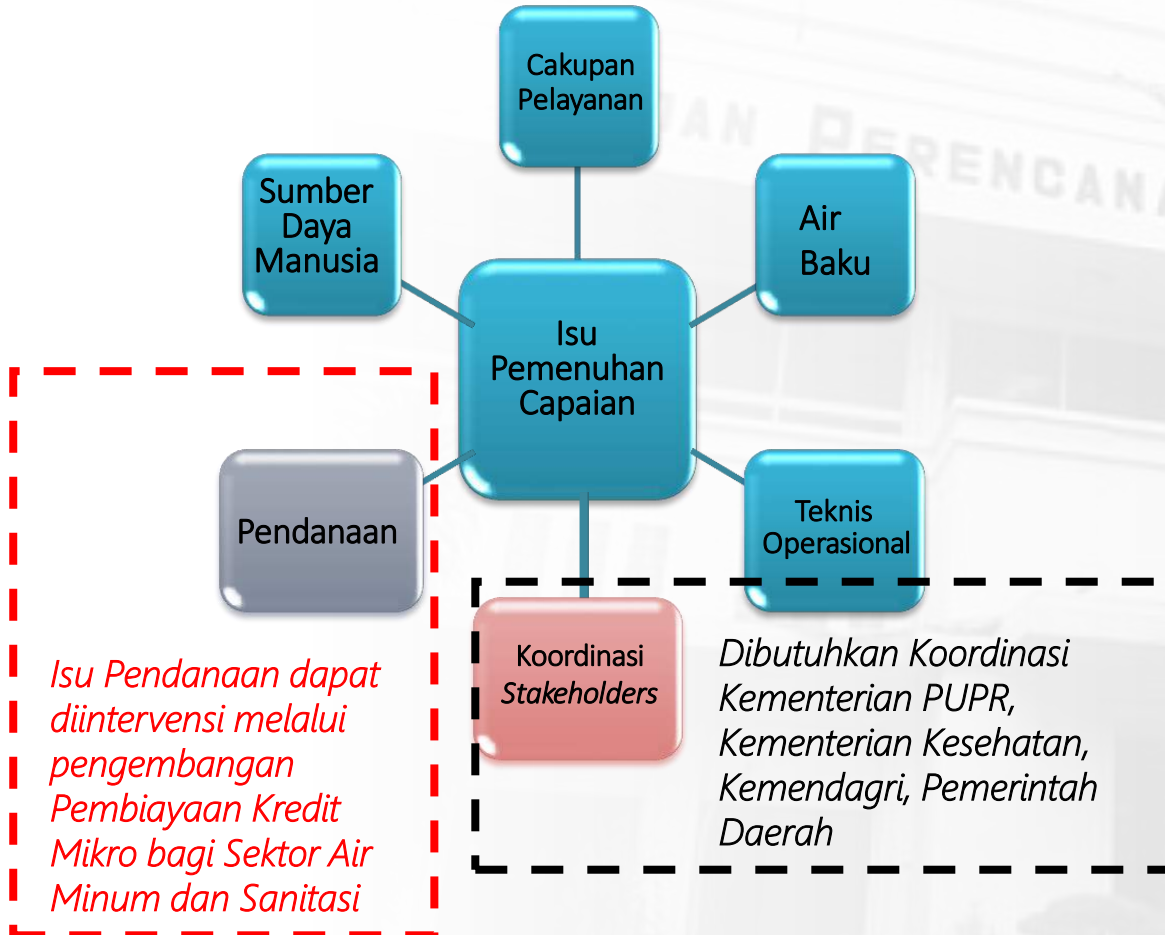
Pemetaan Potensi Pembiayaan Mikro Sektor Air Minum dan Sanitasi



Identifikasi Potensi Kredit Mikro Sektor Air Minum dan Sanitasi

ISU STRATEGIS

Pemenuhan Sasaran Strategis Sektor Air Minum dan Sanitasi



Sumber: DitPSPAM, Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR (2020)

Capaian dan Target Akses Air Minum Layak, Aman dan Perpipaan

- Akses air minum layak meningkat **$\pm 1\%$ per tahun.**
- Gap sekitar 10% (± 27 juta jiwa atau 7,1 juta RT) untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, termasuk $\pm 4,1$ juta RT B40.
- Harga satuan SR: Rp1-1.5 juta (27% dari total kebutuhan investasi SR diasumsikan berasal dari mikro kredit)
- Harga satuan 1 unit BJP: Rp.5-11.5 juta (100% dari mikro kredit)

Potensi kredit mikro: pemasangan sambungan rumah (SR) dan unit Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) di RT

Capaian dan Target Akses Sanitasi Layak, Aman dan Angka Praktik BABS

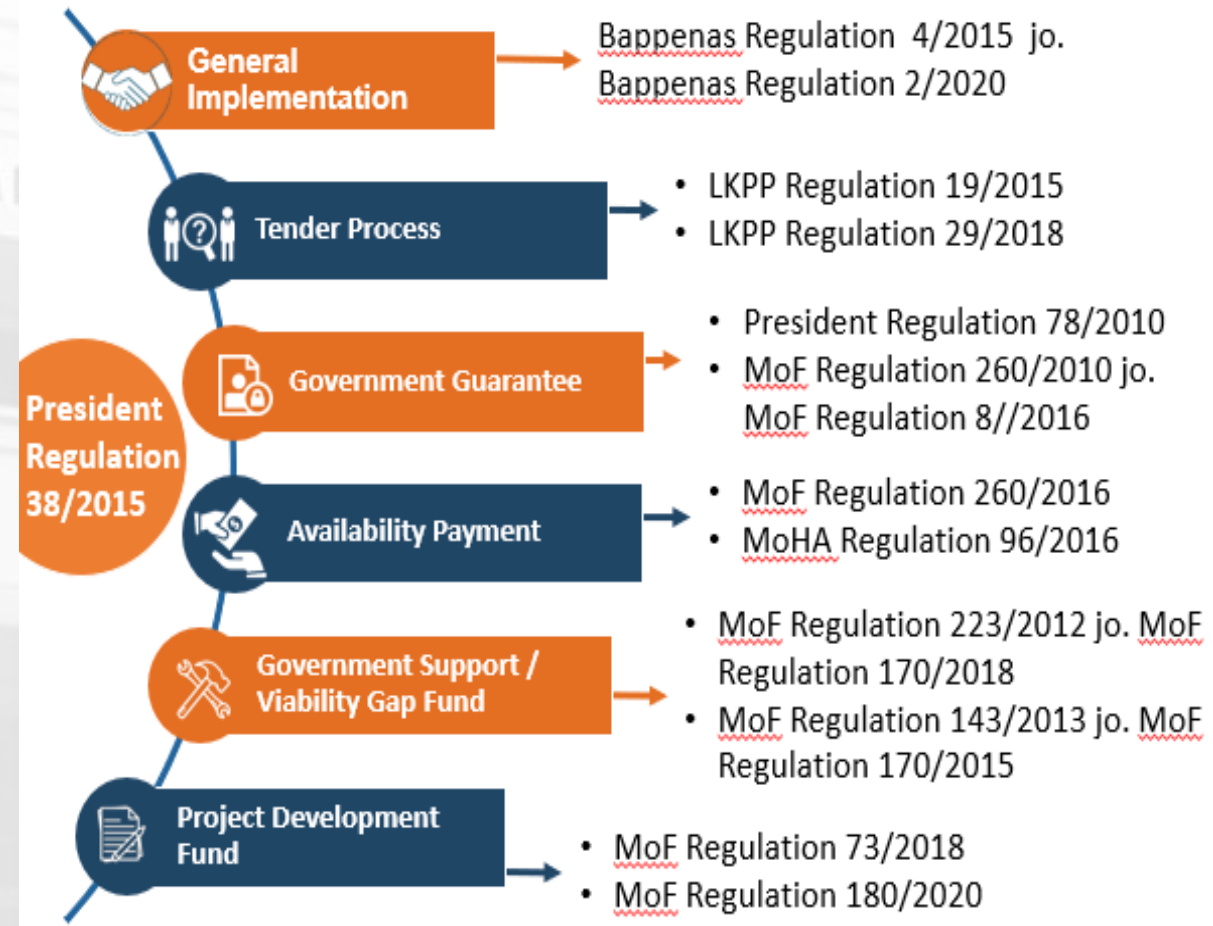
- Akses sanitasi layak meningkat **$\pm 2,35\%$ per tahun**
- Praktik BABS di tempat terbuka menurun **$\pm 1,2\%$ per tahun**
- Gap sekitar 10% (± 27 juta jiwa atau 7,1 juta RT) untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, termasuk $\pm 5,4$ juta RT B40.
- Harga satuan tangki septik: Rp.5juta (100% dari mikro kredit)
- Harga satuan SR IPALD: \pm Rp5 juta (30% diasumsikan dari mikro kredit)

Potensi kredit mikro: pembangunan tangki septik dan pemasangan sambungan rumah IPALD di RT

Kebijakan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

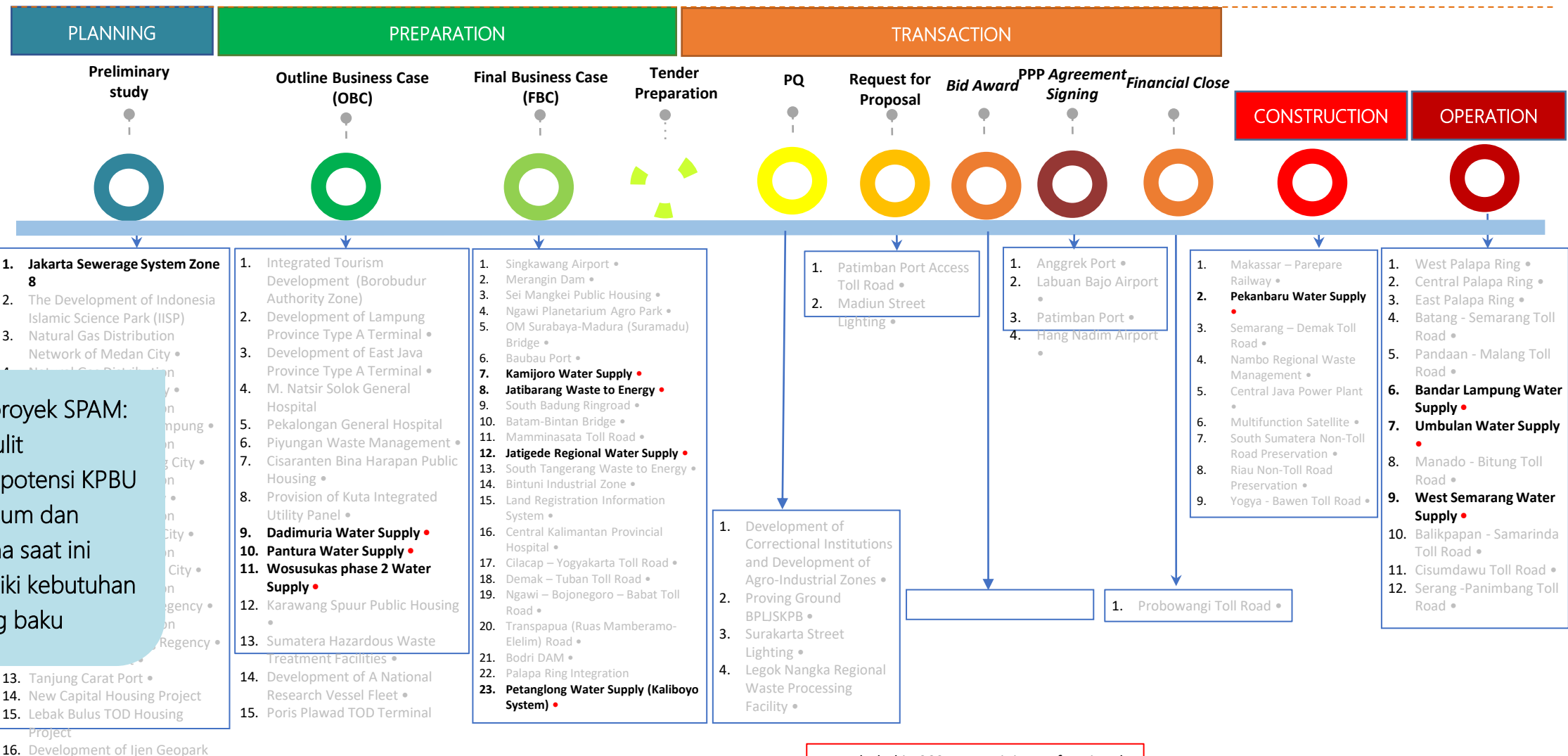
Peraturan Presiden No. 38/2015

Aspects	Regulation	
Subject of partnership	<u>Government</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minister 2. Head of Institution 3. Head of Region 4. SOE/ROE (mandatory by sector regulation) 	<u>Business Entity</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOE/ROE 2. Foreign Business Entity 3. Limited Liability Company 4. Cooperation
Object of Partnership	Economic and Social Infrastructures (20 sectors of infrastructure)	
Government Contribution	<ol style="list-style-type: none"> 1. Government in kind 2. Government support {i.e. Viability Gap Fund} 3. Government guarantee 	
Investment Return for Business Entity	<ol style="list-style-type: none"> 1. User charge (payment by user in the form of tariff) 2. Availability payment (payment of service availability) 3. Other forms as long as it doesn't contravene with the law 	
Phases	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning phase 2. Preparation phase 3. Transaction phase 	



Even though the PPP has been supported by the above regulations, in its implementation, the infrastructure sector regulations are still need to be considered.

PIPELINE PROYEK KPBU (Solicited) SEKTOR WASH HINGGA 2021



- Terdapat 12 proyek SPAM:
- Tantangan: sulit menentukan potensi KPBU untuk air minum dan sanitasi karena saat ini belum memiliki kebutuhan investasi yang baku

• Included in 2021 PPP Minister of National Development Planning decree

Data per 08/04/2022

PLANNING
USD 1,813.28 M

PREPARATION TOTAL: USD 11,522.43 M

TRANSACTION TOTAL: USD 4,896.89 M

CONSTRUCTION
USD 6,257.33 M

OPERATION
USD 4,505.54 M

PIPELINE PROYEK KPBU YANG DIUSULKAN SWASTA (Unsolicited) UNTUK SEKTOR WASH HINGGA 2021

Project proponent submits a proposal and pre-FS document to GCA

Business Entity submits FS

FS evaluation

Procurement

Agreement Signing

Construction

End of Contract and Assignment of Assets

Pre-FS document evaluation to get pre-FS approval

Issuing approval letter

Financial Close

Operation

1. Denpasar Street Lighting

1. Djuanda Regional Water Supply (Jatiluhur II) •
2. Sinumbra Regional Water Supply
3. Pulogebang-Joglo Light Rail Transit (LRT)
4. Jakarta Smart City

1. Kamal – Teluknaga – Rajeg Toll Road •
2. Kediri Airport •
3. North Penajam Paser – Balikpapan Toll Road Bridge •
4. West Lombok Street Lighting •
5. JORR Cikunir – Ulujami Elevated toll road •
6. South Sentul-West Karawang Toll Road •
7. Bogor- Serpong (via Parung) Toll Road •

1. Karian – Serpong Regional Water Supply •
2. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll Road •
3. Gilimanuk – Mengwi Toll Road •

1. Jakarta -Cikampek South Toll Road (US\$ 1,020 million) •
2. Dumai Water Supply (US\$ 33.95 million)
3. Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo Toll Road •
4. Serpong - Balaraja Toll Road •

1. Jakarta - Cikampek Elevated II (US\$ 1,718 million) •
2. Krian-Legundi-Bunder-Manyar (US\$ 897.91 million) •

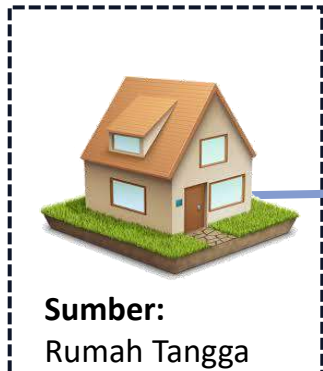
1. Semanan – Balaraja Toll Road •
2. Inner city Cikunir-Karawaci Elevated Toll Road •
3. Semarang Harbour Toll Road •
4. Malang – Kepanjen Toll Road •
5. Bintang Bano Mini-Hydro Power Plant •
6. Kediri – Tulungagung Toll Road •
7. Modernization of The Immigration Control System

1. Multi Lane Free Flow Toll Transaction System •
2. Jatiluhur I Water Supply •
3. Calendaar Hamilton Bridges in Trans Java Main Corridor •

- Terdapat 5 proyek SPAM
- Tantangan: sulit menentukan potensi KPBU untuk air minum dan sanitasi karena saat ini belum memiliki kebutuhan investasi yang baku

• Included in 2021 PPP Minister of National Development Planning decree

KETERLIBATAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Kampanye

- PEMDA
- Masyarakat
- Sektor Kesehatan
- Pemerintah Desa
- Sektor Telekomunikasi
- Sektor Pendidikan
- TNI
- MUI
- **Swasta**

SISTEM SETEMPAT

SISTEM TERPUSAT

- PEMDA
- Masyarakat
- TNI
- **Swasta**

- Pembangunan toilet/fasilitas sanitasi berbasis masyarakat
- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

User interface:
Toilet dan Tangki Septik (kepadatan rendah di perdesaan: cubluk)



User Interface:
a. Toilet
b. Koneksi Sambungan Rumah Ke Sistem Offsite

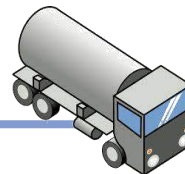
- Pembangunan Toilet
- Pembangunan Sambungan Rumah

- PEMDA (Provinsi dan Kab/Kota)
- Masyarakat
- TNI

- PEMDA
- Sektor Perumahan dan Permukiman (Ke-CiptaKarya-an)
- Kemendagri
- **Swasta**

- Pendampingan *Regular Desludging*/ Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
- Pendampingan Institusi Pengelola
- Pendampingan Penyusunan Perda
- Pengadaan armada - pengaturan armada swasta

Sarana pengangkutan/ penyaluran:
Mobil Sedot Tinja



Sarana Pengolahan:
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)



Sarana pengangkutan/ penyaluran:
Perpipaan



Sarana Pengolahan:
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)



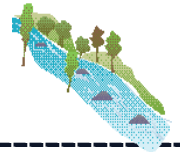
- Pembangunan Infrastruktur IPAL skala kota dan kawasan
- Pendampingan Institusi Pengelola, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan UPTD

- PEMDA/UPTD
- Sektor Perumahan dan Permukiman (Ke-CiptaKarya-an)

Sektor Lingkungan Hidup (BLHD & KLHK)

Monitoring effluen

Effluent
ke badan sungai



Pembuangan Akhir/ Daur Ulang

Pemanfaatan tinja

PEMDA

DRAFT KOMITMEN INDONESIA



DRAFT KOMITMEN DALAM MAM

#1



**Meningkatkan
komitmen politik dan
investasi untuk
mempercepat
peningkatan WASH di
Indonesia**

*Enhance political commitment
and investments to accelerate
scaling up inclusive WASH in
Indonesia*

#2



**Memperkuat
pemantauan dan
pelaporan yang
didorong oleh
kesetaraan dan
keterlibatan
masyarakat**

*Strengthen equity driven
monitoring and reporting and
citizen's engagement*

#3



**Mengembangkan
investasi dan
infrastruktur sektor
WASH yang
berketahanan iklim**

*Developing climate-resilient
WASH sector investment and
infrastructure*

#4



**Memperluas kemitraan
dan memobilisasi
pembiayaan alternatif
untuk meningkatkan
layanan WASH**

*Expand partnerships and
mobilize alternative financing to
scale up WASH services*



Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia dalam rangka menurunkan stunting

:: Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Pengesahan Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS oleh Pokja PPAS Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Finalisasi Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS Sosialisasi dan advokasi Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS bagi Pemda dan stakeholders lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS menjadi produk kebijakan nasional (Bappenas) Seluruh rencana prioritas dan strategi setiap milestone dalam Roadmap diinternalisasi ke dalam Renja K/L 2024, RPJMN 2025-2029, dan Renstra K/L 2025-2029 (Bappenas dan KL terkait) STBM 5 Pilar (termasuk CTPS) menjadi target Renja K/L 2024, RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kemenkes 2025-2029 (Kementerian Kesehatan) 	100% provinsi dan kabupaten/kota menuangkan target akses air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
Sub-komitmen 2: Peningkatan alokasi pendanaan untuk air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene dalam rangka penurunan stunting	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen seluruh K/L di sektora. Alokasi pendanaan untuk air minum, sanitasi dan hygiene untuk meningkatkan pendanaan WASH untuk mendukung penurunan stunting Advokasi dan koordinasi Pokja PPAS Nasional dan Daerah Penyiapan costing tools untuk akses air minum aman, sanitasi aman dan hygiene 	<ol style="list-style-type: none"> Alokasi pendanaan untuk air minum dan sanitasi aman serta hygiene dalam anggaran K/L terkait (Bappenas dan KL terkait) Alokasi pendanaan untuk air minum dan sanitasi aman serta hygiene dalam APBD (Kemendagri dan pemerintah daerah) Air minum, sanitasi dan hygiene menjadi prioritas dan menu seluruh Dana Transfer (DAK, DAU, Dana Desa, DID, dll) 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan alokasi pendanaan APBN untuk air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene 100% Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota mengalokasikan pendanaan air minum dan sanitasi aman dalam APBD, termasuk untuk pemantauan dan evaluasi



Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia dalam rangka menurunkan stunting

:: Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 3: Penguatan Mekanisme Koordinasi untuk WASH dalam Kedaruratan, WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja dan WASH.	Dimulainya penyusunan kerangka WASH di sekolah, WASH fasilitas kesehatan dan WASH di tempat kerja	a. Identifikasi stakeholder terkait yang mendukung WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja	1. Terinternalisasikannya target dan capaian WASH non rumah tangga (Sekolah, Fasilitas Kesehatan dan Tempat Kerja) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran nasional (RPJMN dan Restra K/L) 2. Adanya kebijakan nasional untuk WASH di Sekolah, Fasilitas Kesehatan, dan Tempat Kerja
		b. Identifikasi data dasar yang mendukung WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja	
		c. Framework atau kebijakan pendukung untuk WASH di sekolah, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan kebencanaan	
Sub-komitmen 4: Masterplan Nasional	-	Penyusunan masterplan air minum dan sanitasi nasional	Seluruh provinsi dan kab/kota memiliki masterplan air minum dan sanitasi aman yang diupdate secara berkala



Memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat

:: Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Satu platform pemantauan pencapaian SDG-6	Disahkannya Platform Database SDGs Tujuan 6 Target 6.1 dan 6.2 beserta pihak yang bertanggung jawab (focal point) untuk setiap penyediaan data indikator	a) Pengesahan dan pembaharuan data dasar indikator SDGs 6.1 dan 6.2 setiap tahun oleh pihak-pihak yang ditunjuk; b) Terinternalisasikannya aspek kesetaraan (gender, disabilitas, desil pendapatan, dll) dalam Indikator WASH	Tersedianya data berkala (time series) untuk indikator SDGs 6.1 dan 6.2 hingga tahun 2030 yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam WASH
Sub-komitmen 2: Scale-up tools pemantauan untuk menilai akses air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene	a. Terintegrasinya inspeksi sanitasi setempat dalam sistem monitoring STBM, surveilans kualitas air minum dan EHRA (environmental health risk assessment) di tingkat lokal (Kab/Kota) b. Website STBM berjalan optimal c. PAM-RT berjalan optimal d. Dimulainya surveilans kualitas air minum	Kerangka pemantauan dan pelaporan untuk air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene	Terbentuknya platform pemantauan dan pelaporan yang terpantau secara rutin
Sub-komitmen 3: Mengembangkan tools pemantauan untuk menilai kualitas WASH non-rumah tangga	Optimalisasi Platform yang sudah tersedia yaitu Dashboard SDGs untuk integrasi tools pemantauan dan pelaporan sektor WASH non rumah tangga	Integrasi data dan dokumen yang sudah tersedia ke dalam Dashboard SDGs dan Platform lainnya yang berkaitan	Tersedia dan terintegrasinya data berkala dalam target dan capaian WASH non rumah tangga (Sekolah, Fasilitas Kesehatan dan Tempat Kerja)



Memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat

:: Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 4: Adanya mekanisme pelaporan layanan publik untuk sektor WASH	1. Penyusunan pedoman bagi Pemda untuk memanfaatkan platform layanan publik eksisting untuk menampung masukan dan saran terkait layanan sektor WASH 2. Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk pengembangan mekanisme pelaporan layanan publik melalui SP4N Lapor!	1. Pedoman bagi Pemda untuk memanfaatkan dan mengembangkan platform layanan publik untuk sektor WASH (menggunakan SP4N Lapor!) 2. Pemanfaatan media siar dan/atau media elektronik milik Pemda untuk mendorong pelaporan layanan publik terkait dengan sektor WASH 3. 50% Pemerintah Daerah mulai menerapkan pelaporan layanan publik terkait dengan sektor WASH melalui SP4N Lapor!	1. Seluruh daerah memiliki mekanisme pelaporan untuk layanan public 2. Seluruh daerah menangani dan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk terkait sektor WASH
Sub-komitmen 5: Terbentuknya civic engagement di seluruh lembaga layanan air minum dan air limbah domestik	a. Penyusunan pedoman pendirian dan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH b. Penyusunan mekanisme komunikasi forum pelanggan dan forum WASH c. Adanya forum WASH	a. Pedoman untuk pendirian dan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH sebagai mekanisme pelibatan masyarakat b. Mekanisme komunikasi forum pelanggan dan forum WASH c. Meningkatnya jumlah daerah yang memiliki forum pelanggan dan forum WASH sebagai mekanisme pelibatan masyarakat menjadi Kab/kota d. ...% daerah melaksanakan pilot project terhadap forum pelanggan dan forum WASH yang menerapkan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH	Seluruh daerah memiliki forum pelanggan WASH yang optimal dengan penerapan kerangka penguatan yang telah disusun



Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim

:: Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Penyusunan kerangka pedoman untuk mengarusutamakan sektor WASH ke dalam kebijakan dan peraturan terkait ketahanan iklim di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota	Tersusunnya pedoman untuk mengarusutamakan ketahanan iklim ke dalam kebijakan, rencana, dan investasi di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota	a. Terdapat kerangka kerja pengarusutamaan ketahanan iklim b. Dimulainya inisiasi untuk mengintegrasikan aspek ketahanan iklim dalam dokumen kajian dan perencanaan sektor WASH di provinsi dan kab/kota	a. 100% provinsi dan kab/kota telah mengintegrasikan pembangunan sektor WASH sebagai bagian dari dokumen kajian, kebijakan, perencanaan, dan investasi untuk ketahanan iklim b. Kontribusi sektor WASH dalam mengurangi jejak karbon dan emisi GRK dicatat dan dipantau sebagai bagian dari NDC Indonesia
Sub-komitmen 2: Pencatatan dan Pemantauan Kontribusi sektor WASH terhadap adaptasi dan mitigasi nasional sebagai bagian dari Komitmen NDCs (Nationally Determined Contribution)	a. Adanya pilot WASH yang berketahanan iklim b. Teridentifikasinya kontribusi WASH pada NDC c. Teridentifikasinya daftar inisiatif pembangunan infrastruktur WASH berketahanan iklim, meliputi kontribusi terhadap pengurangan GRK, penghindaran kerugian karena bencana iklim, dan potensi pendanaan iklim, di tingkat nasional dan lokal	a) Terdapatnya kegiatan WASH yang berasal dari pendanaan dari upaya adaptasi dan mitigasi nasional; b) Adanya baseline untuk investasi pembangunan WASH berketahanan iklim; c) Terdapat indikator untuk memantau penurunan jejak karbon melalui pembangunan WASH d) Sistem pemantauan WASH terintegrasi dengan sistem pemantauan perubahan iklim (KLHK) e) Integrasi pendekatan, perencanaan dan program WASH dengan sektor perubahan iklim	

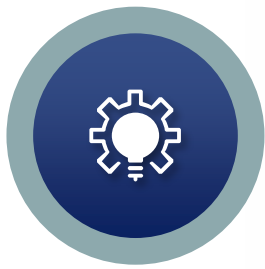


Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim

:: *Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan*

Peran Bisnis

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 3: Pengembangan perilaku dan teknologi WASH yang ramah iklim	a. Tersusunnya pedoman program pengamanan air minum dan sanitasi yang berketahanan iklim	a. Studi untuk mendukung perilaku ramah iklim, termasuk hemat air	a. Seluruh penyelenggara SPAM mulai menerapkan teknologi pemanfaatan air yang ramah iklim
	b. Dikembangkannya pedoman pengelolaan air minum dan air limbah di tingkat rumah tangga dengan berbasis prinsip ramah iklim	b. Teknologi pemanfaatan air yang ramah iklim	b. Adanya pemecuan yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai perilaku pemanfaatan air yang ramah iklim, termasuk perilaku hemat air
	c. Perluasan pembangunan sumur resapan di tingkat rumah tangga	c. Perilaku pemanfaatan air yang ramah iklim	c. 100% PDAM telah menerapkan RPAM yang mengarusutamakan konsep berketahanan iklim
		d. Inventarisasi teknologi air minum dan sanitasi yang ramah iklim	
		e. Penerapan konsep RPAM di penyelenggara SPAM yang berketahanan iklim	
		f. Pembangunan sumur resapan di tiap desa/kelurahan	



Memperluas kemitraan dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk meningkatkan layanan WASH dan meningkatkan green economy

:: Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan

Peran Bisnis

Peran Bisnis

Peran Bisnis

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Pemetaan keterlibatan sektor non-pemerintah dalam WASH	1. Inventarisasi lembaga non pemerintah di sektor WASH berdasarkan kelompok konstituen (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll) 2. Teridentifikasinya berbagai jenis kemitraan di sektor WASH, termasuk WASH di institusi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Seluruh pokja provinsi menjalin kemitraan dengan lembaga non pemerintah (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll)	100% Provinsi telah mendapatkan dukungan pembangunan WASH dari berbagai kelompok konstituen non pemerintah
Sub-komitmen 2: Penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor WASH	Adanya komitmen bersama lembaga non pemerintah (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll) untuk pembangunan WASH melalui Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM)	Meningkatnya peran lembaga non pemerintah dalam pembangunan WASH di tingkat nasional dan daerah, baik dalam bantuan teknis maupun investasi (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll)	
Sub-komitmen 3: Peningkatan pembiayaan alternatif untuk sektor WASH	1. Disusunnya kebijakan nasional tentang pembiayaan alternatif untuk air minum dan sanitasi (mikro kredit rumah tangga) 2. Model pilot untuk mikro kredit KPSPAMS	a) Disahkannya regulasi dan kebijakan khusus untuk MK rumah tangga b) Disahkannya regulasi dan kebijakan untuk MK KPSPAMS (merupakan bagian dari KUR) c) Adanya inisiasi kerja sama dengan LAZ Swasta d) Adanya Panduan CSR dan Filantropi e) Satu mekanisme pendanaan baru untuk air minum dan sanitasi (blended finance, sukuk, dana iklim)	

TERIMA KASIH

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency

Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310
021 3193 6207
bappenas.go.id

